



Gender Economics:

Womenomics: Perempuan dan Pembangunan Ekonomi di Kenya

¹ Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada;

² Bidang Kajian *Microeconomics Dashboard*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Ringkasan

- Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, namun juga melibatkan berbagai perubahan struktur sosial, seperti percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan, sehingga disebut proses multidimensi. Adapun salah satu tantangan proses multidimensi yaitu ketimpangan gender yang menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Kenya.
- Perempuan di Kenya telah lama mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam masyarakat patriarki sehingga lebih cenderung berada dalam kemiskinan yang kemudian secara agregat diikuti penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, peningkatan angka kemiskinan, penurunan harapan hidup, serta ketimpangan kesempatan dan akses terhadap sumber daya (seperti pendidikan dan pekerjaan).
- Sektor agrikultur menjadi tulang punggung perekonomian Kenya dengan komoditas utamanya adalah tebu dan kopi. Maka dari itu, perempuan di Kenya memiliki peran yang krusial namun banyak diantara pekerjaan yang dilakukan perempuan “tidak kasat mata” dan tidak dihargai secara ekonomi, seperti pekerjaan mengurus tanaman pangan, mengurus konsumsi keluarga, dan memasak.
- Selain itu, partisipasi pekerja perempuan di sektor pertanian di Kenya memiliki kecenderungan menurun yang disebabkan oleh multifaktor sosial dan ekonomi, seperti upah yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama.
- Pada dasarnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan. Serta “*Womenomics*” (*women and economy*) merupakan gagasan yang menyebutkan bahwa pemberdayaan ekonomi pada perempuan dapat meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, negara Kenya dapat menerapkan “*Womenomics*” untuk meningkatkan perekonomian.
- Namun demikian, di Kenya terdapat tantangan seperti budaya patriarki, kesenjangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta diskriminasi di sektor tenaga kerja yang menjadi hambatan signifikan. Maka dari itu, diperlukan beberapa upaya untuk mewujudkan “*Womenomics*” di Kenya.

Penulis:

Navisa'tus Sa'diyah ¹
Departemen Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomika dan
Bisnis, Universitas Gadjah
Mada
@mail.ugm.ac.id

Reviewer:

Raniah Salsabilla ²
Asisten Bidang Kajian -
Kajian
raniahsalsaa@gmail.com

Qisha Quarina ²
Koordinator Bidang Kajian
Microeconomics Dashboard
qisha.quarina@gmail.com



Pendahuluan

"Gender inequality is a serious economic issue in Kenya. Addressing it will lead to improved outcomes not only for women themselves, but for families and the society as a whole."

David Nalo, Permanent Secretary, Ministry of Trade and Industry Kenya (Elis *et al.*, 2007)

Pembangunan ekonomi saat ini tidak hanya dipandang sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, namun juga melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan, sehingga disebut proses multidimensi (Todaro & Smith, 2011). Salah satu tantangan signifikan dalam proses ini adalah ketimpangan gender yang menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang. Dengan menyoroti konsep *womenomics*, kajian edisi khusus *Microeconomics Dashboard* kali ini akan membahas mengenai hubungan dan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan ekonomi, serta strategi yang diperlukan untuk mendorong partisipasi perempuan dan kesetaraan gender di Kenya.

Dari perspektif *womenomics*, meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dan memberdayakan perempuan dapat menguntungkan ekonomi secara keseluruhan (UNDP, 2021). Hal tersebut menyoroti manfaat ekonomi dari permasalahan kesenjangan gender. Partisipasi perempuan dalam berbagai sektor ekonomi berkontribusi pada peningkatan *output* dan produktivitas nasional suatu negara. Perempuan juga seringkali memprioritaskan pendidikan dan kesehatan anak-anak, sehingga dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan memutus siklus kemiskinan (Todaro & Smith, 2011). Berbagai penelitian yang dilakukan di negara berkembang membuktikan bahwa perempuan cenderung menggunakan lebih banyak penghasilannya untuk kepentingan anak-anak mereka dibandingkan laki-laki. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa budaya patriarki membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik (Palulungan *et al.*, 2020). Perempuan tidak setara dengan laki-laki dalam akses pendidikan, kesehatan, dan bentuk kebebasan yang lain (Vokic *et al.*, 2019).

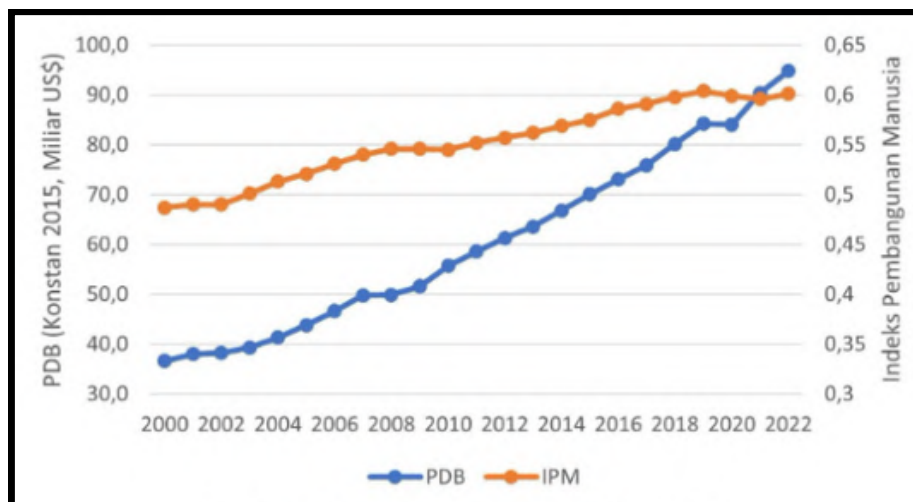
Perempuan telah lama mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam masyarakat patriarki seperti di Kenya. Menurut Kriti & Tisdell (2003), perempuan di Kenya lebih cenderung berada dalam kemiskinan, yang kemudian secara agregat diikuti dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, peningkatan angka kemiskinan, dan penurunan harapan hidup. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Owano (2014) menemukan bahwa kesenjangan gender di Kenya berkaitan dengan isu-isu kesetaraan kesempatan dan akses terhadap sumber daya, seperti pendidikan dan pekerjaan. Terdapat pembagian kerja yang tidak hanya menciptakan kesenjangan gender dalam hal pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga kesenjangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan (Njiro, 2003).



Profil Negara Kenya

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki kecenderungan meningkat sejalan dengan peningkatan PDB Kenya selama 2 (dua) dekade terakhir. Sementara itu, sektor pertanian (Gambar 2) menjadi tulang punggung perekonomian Kenya yang menyerap lebih dari setengah tenaga kerja dari total populasi serta dengan komoditas utamanya adalah tebu dan kopi (Gambar 3).

Gambar 1. Tren PDB dan IPM di Kenya Tahun 2000-2022



Sumber: World Bank, 2024, diolah penulis.

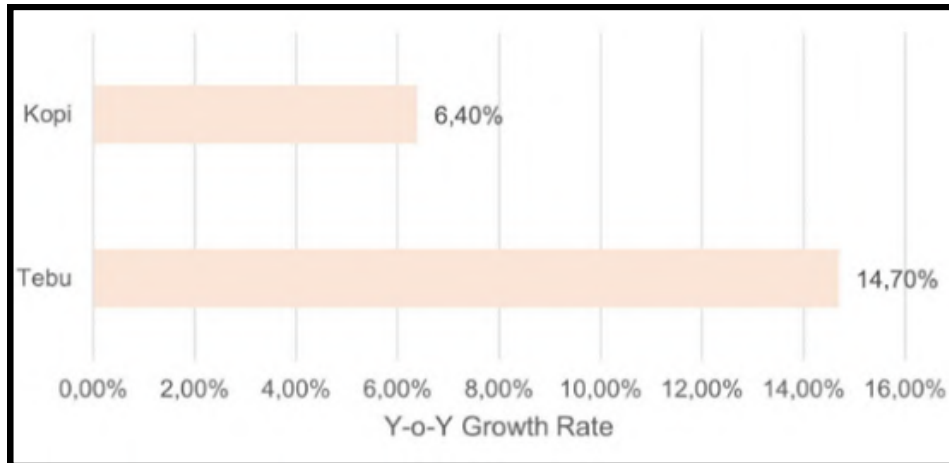
Gambar 2. Profil Pekerja berdasarkan Sektor Utama Perekonomian Kenya



Sumber: Statista, 2023a, diolah penulis.



Gambar 3. Komoditas Utama Sektor Pertanian Kenya Tahun 2021



Sumber: Statista, 2023b, diolah penulis.

Sejalan dengan pertumbuhan PDB, IPM Kenya juga mengalami tren kenaikan, bahkan mencapai 0,6 pada tahun 2022 (Gambar 1). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kenya dapat berkinerja baik dengan tingkat pendapatan yang menengah, serta mengalami “pertumbuhan dengan pembangunan”. Semakin banyak pendapatan suatu negara memungkinkan negara tersebut untuk berinvestasi di modal manusia lebih banyak serta dapat meningkatkan produktivitas (Todaro & Smith, 2011). Dengan adanya peningkatan investasi dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor.

Di sisi lain, menurut teori pertumbuhan Rostow, suatu negara bertransisi melalui 5 (lima) tahap dalam upaya mencapai kemajuan (Todaro & Smith, 2011). Sementara Kenya merupakan salah satu negara *lower-middle income*, dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Lebih lanjut, **jika ditinjau dengan teori *Rostow-linear stage of growth*, negara Kenya masih berada di tahap prakondisi lepas landas yang ditandai dengan sektor industri yang mulai berkembang namun dengan sektor pertanian sebagai sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.**

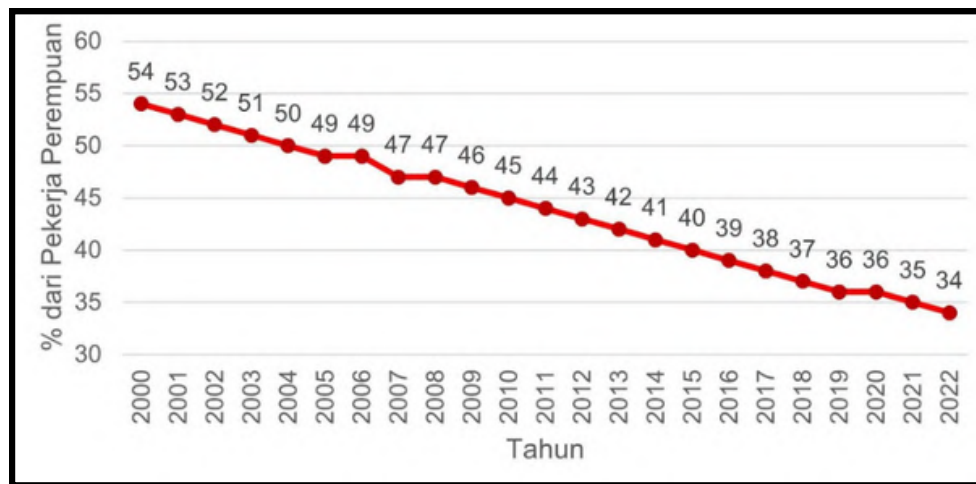
Sementara itu, sektor pertanian tidak hanya menjadi penggerak ekonomi Kenya, namun juga menjadi mata pencaharian bagi hampir seluruh masyarakat. Sektor pertanian telah menyerap lebih dari 50% tenaga kerja dari total populasi dan lebih dari 70% penduduk di daerah perdesaan (FAO, 2024). Selain itu, sektor pertanian turut menyumbang pendapatan ekspor sebesar 65% (FAO, 2024). Adapun komoditas tebu dan kopi yang memberikan kontribusi paling besar terhadap sektor pertanian di tahun 2021 (Statista, 2023b). Kedua komoditas tanaman tersebut diketahui dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi Rift Valley Kenya.



Peran Perempuan di Sektor Pertanian Kenya

Sebagai negara dengan perekonomian yang bertumpu di sektor pertanian, perempuan di Kenya memiliki peran yang krusial. Namun, banyak diantara pekerjaan yang dilakukan “tidak kasat mata” atau sulit dihitung karena perempuan tidak menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya, pekerjaan mengurus tanaman pangan, mengurus konsumsi keluarga, dan memasak, yang merupakan bagian fundamental dari kontribusi perempuan dalam ketahanan pangan rumah tangga. Pekerjaan tersebut sering kali tidak dihargai secara ekonomi dan tidak dimasukkan dalam statistik tenaga kerja resmi sehingga mengaburkan peran perempuan dalam sektor pertanian.

Gambar 4. Pekerja Perempuan di Sektor Pertanian



Sumber: World Bank, 2024, diolah penulis.

Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan Kenya di sektor pertanian terus mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena multifaktor sosial-ekonomi, seperti perempuan sering kali menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya seperti tanah, kredit, dan teknologi pertanian. Di samping itu, perempuan terdiskriminasi dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian Kenya karena budaya patriarki dan norma gender yang diskriminatif.

Pada dasarnya peran untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga berada di tangan perempuan. Seperti salah satu studi yang dilakukan oleh Lufuke dan kawan-kawan (2022) di Afrika menemukan bahwa pemberdayaan perempuan berhubungan dengan peningkatan perbaikan pola makan dan gizi rumah tangga. Oleh karena itu, rancangan kebijakan harus memastikan bahwa perempuan bisa mendapatkan manfaat yang setara karena partisipasi perempuan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pertanian (Todaro & Smith, 2011).



Selain itu, rancangan kebijakan juga harus berfokus pada penyediaan akses yang lebih luas bagi perempuan terhadap sumber daya, teknologi, dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Dengan demikian, perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam ekonomi, dan berkontribusi pada ketahanan pangan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Kenya telah memberlakukan kebijakan *The National Land Policy* (2009) yang di dalamnya terdapat peraturan untuk melindungi hak atas tanah bagi perempuan untuk memastikan partisipasi dan manfaat yang diperoleh mereka di sektor pertanian. Sementara itu, *Land Registration Act* (2012) mengatur tentang pendaftaran tanah bersama oleh suami-istri dan persetujuan suami-istri bersama dalam hal berkaitan dengan tanah. Kemudian *Land Law Amendments* (2016) menghapus ketentuan dalam undang-undang yang mengatur pengakuan hak-hak suami-istri atas harta perkawinan dan tanah sebagai hak utama atas tanah yang telah didaftarkan. Hal ini kemudian memengaruhi hak-hak perempuan atas kepemilikan sumber daya khususnya tanah.

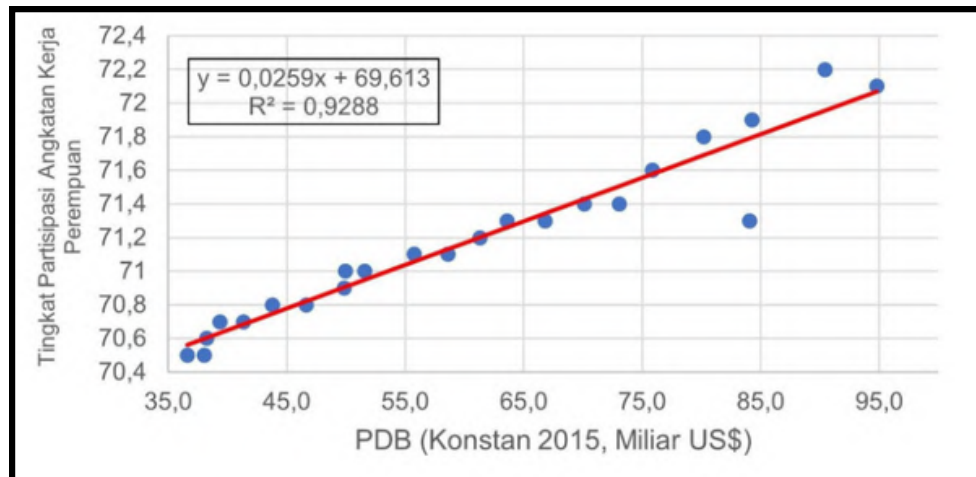
Apakah *Womenomics* dapat Diterapkan di Negara Kenya?

Menurut Todaro dan Smith (2011), agar dapat menghasilkan dampak pembangunan yang signifikan, suatu masyarakat harus memberdayakan dan menginvestasikan sumber daya bagi kaum perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, antara lain tanggung jawab untuk mengasuh anak, dan dengan sumber daya yang dimiliki perempuan dapat menentukan bisa atau tidaknya untuk memutus rantai kemiskinan. Selain itu, perempuan juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan lebih banyak penghasilannya untuk kepentingan anak-anak dibandingkan dengan laki-laki.

Sejalan dengan Todaro dan Smith, "*womenomics*" (*women and economy*) merupakan gagasan yang menyebutkan bahwa pemberdayaan ekonomi pada perempuan dapat meningkatkan ekonomi secara keseluruhan (Sameer, 2019). Dengan melibatkan lebih banyak perempuan dalam perekonomian, negara-negara dapat meningkatkan PDB. Bahkan menurut World Bank (2023), menutup kesenjangan gender dalam pekerjaan dapat meningkatkan PDB per kapita jangka panjang rata-rata sekitar hampir 20% di seluruh negara. Adapun beberapa aspek kunci dalam *womenomics* meliputi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, menutup kesenjangan upah berdasarkan gender, serta lebih banyak berinvestasi dalam pendidikan dan keterampilan perempuan.



Gambar 5. PDB dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kenya



Sumber: World Bank, 2024, diolah penulis.

Lebih lanjut, pada Gambar 5 menunjukkan bahwa *womenomics* dapat diterapkan karena tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berkorelasi positif terhadap PDB, bahkan di negara patriarki seperti Kenya. Hal tersebut mengindikasikan ketika lebih banyak perempuan berpartisipasi dalam angkatan kerja, perempuan dapat membawa keterampilan dan pengetahuan ke dalam perekonomian, sehingga dapat memperluas kapasitas produktif secara keseluruhan. Dengan demikian, sumber daya manusia yang lebih tinggi akan meningkatkan *output*, inovasi, dan efisiensi perekonomian suatu negara, khususnya di Kenya.

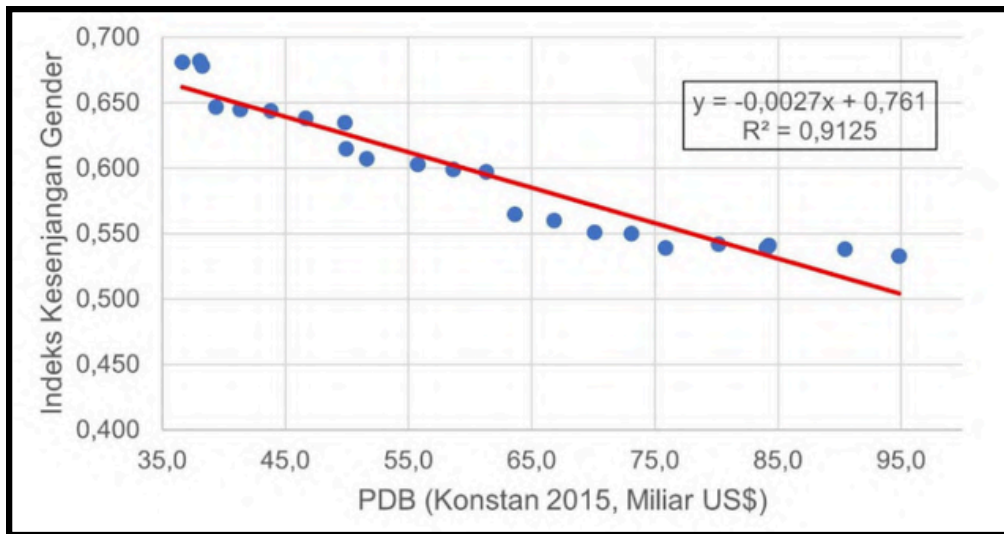
Selain itu, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, meningkatkan standar hidup secara keseluruhan, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan pendapatan tersebut dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa rumah tangga, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, memberdayakan perempuan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, menurunkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Bhoganadam *et al.*, 2014).

Hubungan Antara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Kenya

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah matriks gabungan yang mengukur kesenjangan gender menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja (UNDP, 2024). Nilai IKG yang tinggi mengindikasikan tingginya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Adapun nilai IKG berkisar antara 0, di mana perempuan dan laki-laki berkedudukan setara, hingga 1, serta salah satu jenis kelamin terdiskriminasi dalam semua dimensi yang diukur.



Gambar 6. Hubungan antara IKG dan PDB di Kenya



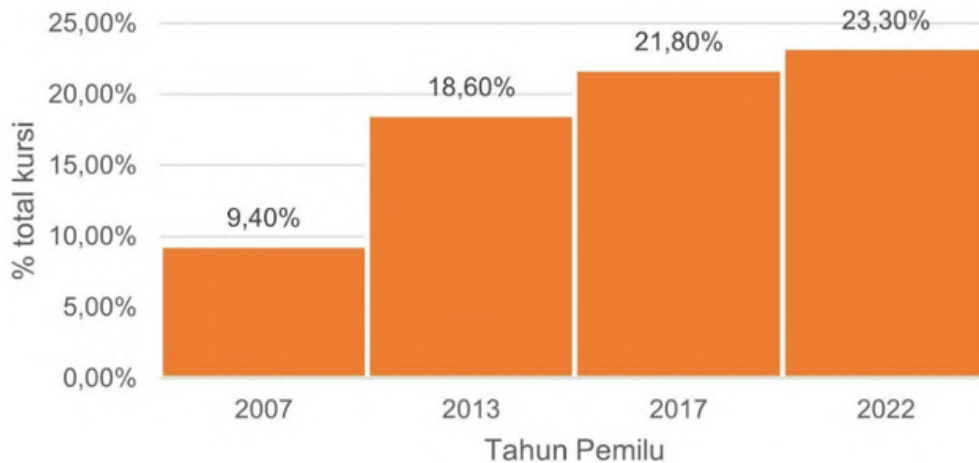
Sumber: UNDP, 2024; World Bank, 2024, diolah penulis.

Lebih lanjut, Gambar 6 menunjukkan hubungan antara IKG dan PDB Kenya berkorelasi negatif. Data tersebut sejalan dengan studi dari Silva & Klasen (2021) yang menemukan bahwa kesenjangan gender merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam investasi sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi dalam jangka panjang. Pada dasarnya status keuangan dan pendidikan ibu sangat mencerminkan tingkat pendidikan dan status keuangan anak-anak di masa depan dibandingkan dengan ayahnya. Dengan demikian, pewarisan manfaat investasi modal manusia di masa kini untuk generasi selanjutnya lebih memungkinkan jika peran perempuan diintegrasikan dalam proses pertumbuhan.

Di samping itu, salah satu indikator untuk mengukur IKG adalah angka kematian ibu dan jatah kursi di parlemen. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan perhatian pada dampak sosial dan ekonomi dari kesehatan ibu yang buruk dan berimplikasi pada penurunan angka kematian ibu di Kenya. Anak-anak yang ibunya meninggal dunia lebih mungkin untuk tidak bersekolah karena harus bekerja menggantikan peran ibu (Reed et al., 2000). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dipandang sebagai masalah pembangunan yang lebih luas dan berdampak pada pemberdayaan perempuan, kesejahteraan rumah tangga, serta pembangunan ekonomi nasional suatu negara.



Gambar 7. Persentase Perempuan di Parlemen Kenya



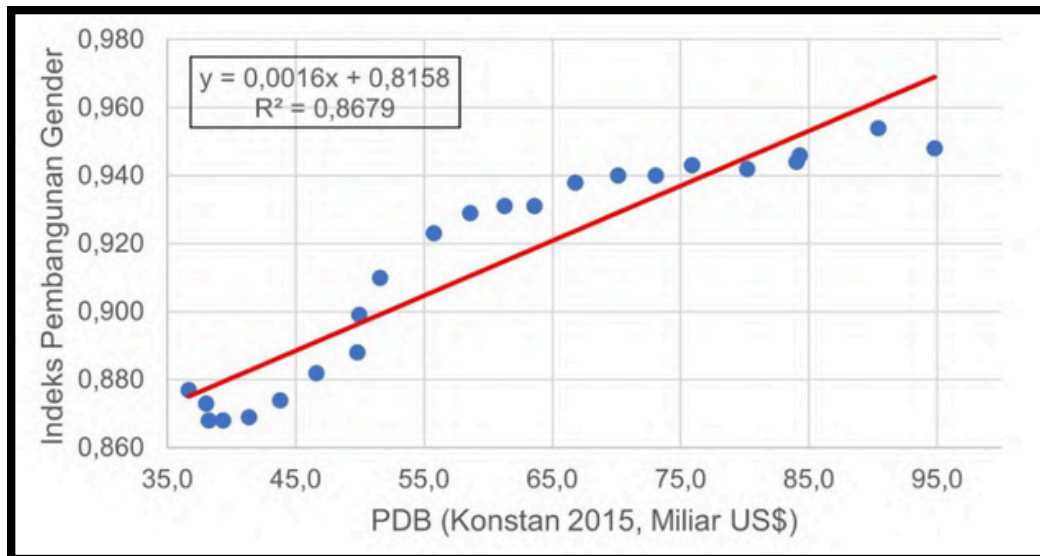
Sumber: IPU, 2024, diolah penulis.

Seperti sebuah studi yang dilakukan oleh Mirziyoyeva & Salahodjaef (2023) menemukan bahwa partisipasi perempuan di parlemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemajuan ekonomi. Negara Kenya sendiri sudah mulai memperhatikan hal tersebut, yang ditandai dengan disahkannya “*Gender Rule*” dalam konstitusi 2010. Selain itu, Gambar 7 menunjukkan persentase perempuan di parlemen Kenya pada tahun 2022 yaitu sebesar 23,3% yang menandakan adanya peningkatan representasi perempuan di pemerintahan Kenya dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, jumlah itu masih jauh di bawah kuota gender yang ditetapkan dalam konstitusi 2010 yaitu sebesar 10% di bawah kuota representasi 33% yang diamanatkan oleh konstitusi. Saat ini, negara Kenya mengakui kegagalannya dalam memenuhi kuota tersebut, namun belum melakukan upaya untuk menetapkan peraturan khusus untuk mengatasi kegagalan tersebut.

Hubungan Antara Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Kenya

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur kesenjangan gender dalam pencapaian 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan penguasaan atas sumber daya ekonomi (UNDP, 2024). Semakin tinggi nilai IPG mengindikasikan semakin tinggi kesetaraan gender suatu negara. Sementara itu, kesetaraan gender dalam pekerjaan, tingkat kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang setara, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan hak-hak sebagai faktor kunci yang dapat berdampak positif pada perkembangan ekonomi (Nguyen, 2021).

Gambar 8. Hubungan antara IPG dan PDB di Kenya



Sumber: UNDP, 2024; World Bank, 2024, diolah penulis.

Pada Gambar 8 mengindikasikan bahwa IPG berkorelasi positif dengan PDB Kenya. Hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan negara Kenya diiringi dengan peningkatan kesetaraan gender. Lebih lanjut, fakta tersebut mencerminkan adanya dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap peluang dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Peningkatan pendapatan nasional memungkinkan pemerintah Kenya untuk meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi perempuan. Dengan demikian, peningkatan investasi tersebut dapat membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai.

Lebih lanjut, menurut Todaro dan Smith (2011), kesehatan dan pendidikan dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sekaligus sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Kesehatan dan pendidikan berperan ganda, baik sebagai input sekaligus *output*, yang menjadikan keduanya sangat penting dan berkaitan erat bagi pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan Todaro dan Smith (2011), studi Misango (2022) menemukan bahwa peningkatan belanja kesehatan pemerintah di Kenya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,30% dengan mempromosikan kebijakan kesehatan pilar sosial. Modal kesehatan yang semakin besar juga dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan semakin panjang usia seseorang, maka tingkat pengembalian investasi di bidang pendidikan juga semakin banyak.

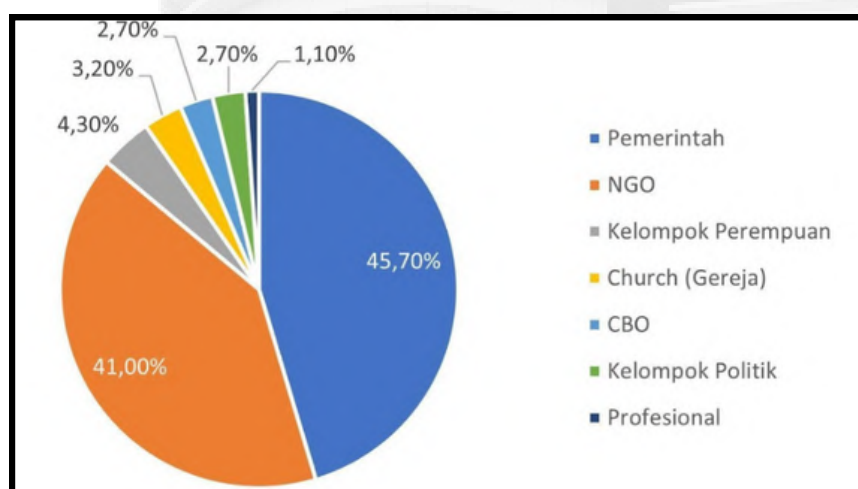


Selain itu, kesehatan yang lebih baik dalam masa kerja seseorang juga dapat memengaruhi penurunan tingkat penyusutan modal pendidikan. Di lain sisi, semakin besar modal pendidikan, semakin besar pula tingkat pengembalian atas investasi di bidang kesehatan karena banyak program kesehatan bergantung pada keterampilan dasar di sekolah. Selain itu, petugas kesehatan juga dibentuk dan dilatih melalui pendidikan. Serta peningkatan efisiensi produktif dari investasi pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi kesehatan yang meningkatkan harapan hidup (Todaro & Smith, 2011).

Sementara itu, perempuan di Kenya menghadapi banyak hambatan untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Hambatan tersebut mencakup ketimpangan dalam layanan kesehatan, sulitnya akses layanan kesehatan, dan mahalnya biaya perawatan yang berkualitas. Selain itu, perempuan juga menghadapi hambatan ekonomi dan budaya yang menghalangi akses layanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana halnya laki-laki (Gillio *et al.*, 2021). Hambatan tersebut diperparah dengan praktik tradisional, seperti pernikahan anak di bawah umur yang menghambat pendidikan anak perempuan dan meningkatkan keabsenan perempuan di sekolah (Ayienda, 2021). Menurut data dari UNICEF (2021) jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun sebanyak 4,2 juta sehingga Kenya disebut sebagai rumah bagi lebih dari 4 juta pengantin anak.

Menindaklanjuti tingginya angka pernikahan anak di bawah umur, studi Lamet & Njenga (2020) menyebutkan terdapat pengaruh *community mobilizer* untuk memitigasi dan mengurangi pernikahan anak di Kenya. Pada Gambar 9 menunjukkan bahwa pemerintah (45,7%) dan *non-governmental organizations* (NGO) (41,0%) merupakan penggerak utama masyarakat untuk mengurangi pernikahan anak dibandingkan dengan *community mobilizer* lainnya. Peran penting pemerintah dan NGO dalam upaya mobilisasi ini terkait dengan kuatnya pengaruh kepala suku di masyarakat Kenya. Kepala suku memiliki otoritas yang besar dan sangat dihormati, karena pengaruh mereka sudah melekat dalam budaya, adat, dan tradisi masyarakat Kenya (Lamet & Njenga, 2020). Oleh karena itu, diperlukan integrasi masyarakat dalam undang-undang tentang pernikahan anak.

Gambar 9. *Community Mobilizer* Kenya



Sumber: Lamet & Njenga, 2020, diolah penulis.



Penutup dan Diskusi Kebijakan

Pemberdayaan perempuan di Kenya, khususnya melalui penerapan prinsip *womenomics*, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan mengintegrasikan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, juga dapat memungkinkan pewarisan manfaat investasi modal manusia di masa kini untuk generasi selanjutnya. Namun, tantangan seperti budaya patriarki, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta diskriminasi dalam sektor tenaga kerja di Kenya masih menjadi hambatan yang signifikan. Untuk itu, diperlukan beberapa diskusi kebijakan untuk mewujudkan potensi penuh *womenomics* di antaranya:

1. **Harmonisasi hukum pertanahan dengan organisasi masyarakat untuk mengedukasi mengenai hak-hak hukum perempuan khususnya hak kepemilikan sumber daya seperti tanah (Ministry of Public Service, Youth and Gender., 2019).** Terlepas dari peran penting kebijakan The National Land Policy (2009) yang memastikan kesetaraan hak bagi perempuan atas tanah, masih banyak masyarakat yang belum menyadarinya. Oleh karena itu, disinilah peran organisasi masyarakat untuk melakukan sosialisasi agar manfaat dari peraturan tersebut dapat dirasakan bagi perempuan di seluruh kalangan sosial.
2. **Menerapkan dan memonitor kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung upah minimal dan perlindungan hak pekerja, khususnya bagi perempuan untuk menutup kesenjangan dalam akses terhadap peluang ekonomi, kesenjangan pendapatan, dan produktivitas.** Upah perempuan seringkali lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, maka adanya kebijakan ini memastikan bahwa perempuan menerima upah yang berhak mereka dapatkan, yang dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka dalam angkatan kerja (ILO, 2016).
3. **Penekanan yang lebih besar dalam menerapkan sistem kuota gender yang memungkinkan masuknya perempuan ke dalam parlemen melalui sistem lain seperti kuota partai (Ministry of Public Service, Youth and Gender., 2019).** Dengan sistem ini mengharuskan partai politik untuk menetapkan secara sukarela atas persentase kursi pemilu untuk kandidat perempuan saja. Meskipun konstitusi 2010 sudah berhasil meningkatkan representasi perempuan di parlemen Kenya, namun dalam praktiknya masih gagal dalam memenuhi kuota yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus seperti sistem kuota partai untuk mengatasinya, karena keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh positif terhadap kemajuan ekonomi.
4. **Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya perempuan.** Dengan menginvestasikan di bidang kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan di daerah perdesaan dan terpencil, serta menyediakan peralatan dan obat-obatan yang memadai sehingga bisa diakses bagi perempuan di semua kalangan sosial (Ministry of Public Service, Youth and Gender., 2019).
5. **Menerapkan undang-undang yang melarang pernikahan anak dengan mengintegrasikan masyarakat untuk menyuksekkannya serta memberikan insentif bagi anak perempuan untuk bersekolah.** Pernikahan anak di Kenya telah membudaya, oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan tetua desa atau pemimpin komunitas masyarakat agar dapat membantu mengubah norma dan budaya yang mendukung praktik ini (Lamet & Njenga, 2020). Pendidikan berperan penting dalam pengembangan keterampilan dan pemberdayaan perempuan, mengurangi ketidaksetaraan dan bias gender, serta mendorong perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan (Shetty & Hans, 2019). Sehingga memberikan insentif bagi anak perempuan untuk bersekolah dapat dipandang sebagai investasi bagi pembangunan negara.



Referensi

- Ayienda, V. (2021). Influence of Early Marriages on Girls Academic Performance in Public Secondary Schools in Nyamache Sub County, Kisii County. . <https://doi.org/10.47310/HJEL.2021.VO21O2.O27>.
- Bhoganadam, S. D., Hema, M., & Srinivasa, R. D. (2014). Indian Journals. Women's Empowerment and Economic Development, 4(8). ISSN: 2249-8834
- Biwott, S. K., Okinyi, B., Anne, A., Maureen, A., Datche, C., Khasewe, D., Jarald, E., Onyango, E. A., Ounga, F. O., Otieno, F., Chebi, J., Amity, L., Shankiy, W., Chege, M., & Ruoro, C. (2018). Determinants of structural, behavioral and cultural practices that perpetuate child marriage in siaya, homabay and kisumu counties in kenya. International journal for social studies. <https://www.semanticscholar.org/paper/Determinants-of-Structural%2C-Behavioral-and-Cultural-Biwott-Okinyi/c3087e55e9b040077c9d35082fa5ae388f23da81>
- Cowling, N. (2024). Agriculture in Kenya - statistics & facts. Statista. Retrieved June 24, 2024, from <https://www.statista.com/topics/8938/agriculture-in-kenya/#topicOverview>
- Elis, A., Cutura, J., Dione, N., Gillson, I., Manuel, C., & Thongory, J. (2007). Gender and Economic Growth in Kenya. World Bank Document. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/665991468285651926/pdf/40522OREPLACEM101OFFICIALOUSEONLY1.pdf>
- FAO. (2024). Kenya at a glance | fao in kenya | food and agriculture organization of the united nations. Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/kenya/fao-in-kenya/kenya-at-a-glance/en/>
- Gillio, A. M., Li, H. W., Bhatia, M. B., Chepkemoi, E., Rutto, E. J., Carpenter, K. L., Saruni, S. I., Keung, C. H., & Hunter-Squires, J. L. (2021). Gender differences in insurance, surgical admissions and outcomes at a kenyan referral hospital. Journal of Surgical Research, 268, 199–208. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.06.014>
- ILO. (2016). Women at work. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_457317.pdf
- IPU (Inter-Parliamentary Union). (2024). Kenya | National Assembly | Data on women | IPU Parline: global data on national parliaments. IPU Parline. <https://data.ipu.org/parliament/KE/KE-LCO1/data-on-women/>
- Kobia, M., & Tsungu, S. K. (2019). Ministry of Public Service, Performance and Delivery Management. NATIONAL POLICY ON GENDER AND DEVELOPMENT. <https://psyg.go.ke/wp-content/uploads/2019/12/NATIONAL-POLICY-ON-GENDER-AND-DEVELOPMENT.pdf>
- Kiriti, T., & Tisdell, C. A. (2003). Gender inequality, poverty and human development in kenya: Main indicators, trends and limitations. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.105587>
- Lamet, J., & Njenga, S. (2020). Community Mobilization Strategy on Preventing Child Marriages among the Maasai Community, in Kenya. The International Journal of Humanities & Social Studies. <https://doi.org/10.24940/theijhss/2020/v8/i6/hs2006-096>.
- Lufuke, M., Bai, Y., Fan, S., & Tian, X. (2022). Women's Empowerment, Food Security, and Nutrition Transition in Africa. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010254>.
- MINISTRY OF LANDS. (2009). *The National Land Policy*. <https://lands.go.ke/sessional-paper-no-3-of-2009-on-national-land-policy/>
- Ministry of Public Service, Youth and Gender. (2019). National policy on gender and development. <https://gender.go.ke/wp-content/uploads/2021/06/Final-NPGAD-2021.pdf>



- Mirziyoyeva, Z., Raufron Salahodjaev. (2023). Does representation of women in parliament promote economic growth? Considering evidence from Europe and Central Asia. *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1120287>
- Misango, K. (2022). Assessment of Government Health Expenditure and Economic Growth in Kenya. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i5-24>.
- Nguyen, C. (2021). Gender equality and economic complexity. *Economic Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100921>.
- Njiro, E. (2003). Policy Commons. *Gender Variable in Agricultural Technology: A Case Of Rural Farmers in Machakos District - Eastern Kenya*. <https://policycommons.net/artifacts/1446240/gender-variable-in-agricultural-technology/2078006/>
- Owano, N. (2014). Gender Disparities in Kenya. *Journal of Research in Gender Studies*, 4, 298–312.
- Palulungan, L., Kordi, G., & Ramli, M. T. (2020, Februari). YAYASAN BaKTI. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. ISBN: 978 -602-50896-7-1
- Reed, H. E., Marjorie A. Koblinsky, & Henry Mosley. (2000). *The consequences of maternal morbidity and maternal mortality: Report of a workshop*. National Academies Press.
- Sameer, B. D. (2019). Human Progress. *THE FEMALE EMPLOYMENT ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS INCREASING WAYS*. DOI: 10.34709/IM.157.1
- Shetty, S., & Hans, V. B. (2019). EPRA International Journal of Economic and Business Review. *Education for Skill Development and Women Empowerment*, 7(2). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3348246
- Silva, M., & Klasen, S. (2021). Gender inequality as a barrier to economic growth: a review of the theoretical literature. *Review of Economics of the Household*, 19, 581 - 614. <https://doi.org/10.1007/s11150-020-09535-6>.
- Statista. (2023a, November 6). *Kenya: total employment by sector*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1134332/total-employment-in-kenya/>
- Statista. (2023b, September 22). *Performance of key agricultural products in Kenya in 2021*. <https://www.statista.com/statistics/1206522/performance-of-key-agricultural-products-in-kenya/>
- *The Land Laws (Amendment) Act 2016*. (2016). https://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/AmendmentActs/2016/LandLaws_Amendment_Act_28of2016.pdf
- *THE LAND REGISTRATION ACT 2012*. (2012). the National Council for Law Reporting. https://eregulations.invest.go.ke/media/Land_Registration_Act__No_3_of_2012_.pdf
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga. ISBN: 007-330-016-0
- UNICEF. (2021). *Child marriage*. UNICEF. <https://www.unicef.org/kenya/topics/child-marriage>
- UNDP (United Nations Development Programme). (2021). *Womenomics*. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/pk/DAP-Womenomics-March-2021-English-web-only.pdf>
- UNDP (United Nations Development Programme). (2024). United Nations Development Programme. Retrieved June 24, 2024, from <https://www.undp.org/home>
- Vokic, N., Obadić, A., & Ćorić, D. (2019). Previous Findings about the (In)Equality of Highly Educated Women. *Gender Equality in the Workplace*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18861-0_6
- World Bank. (2023). *Women, business and the law 2023 report*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/02/pace-of-reform-toward-equal-rights-for-women-falls-to-20-year-low>
- World Bank. (2024). World Bank. Retrieved June 24, 2024, from <https://data.worldbank.org/>



- World Integrated Trade Solution (WITS). (2023). *Zimbabwe Maize Seed Imports by Country*. Worldbank.org.
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ZWE/Year/2011/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/16-24_FoodProd
- Zimbabwean Vulnerability Assessment Committee (ZimVAC). (2019). ReliefWeb.
<https://reliefweb.int/report/zimbabwe/zimbabwe-vulnerability-assessment-committee-zimvac-2019-urban-livelihoods-assessment>

